



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /0 /B.IX/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan Calon Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA – SKPD;
 2. menyusun DPA – SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 15. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

b. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
8. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
9. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

c. Bendahara Pengeluaran :

1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
7. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan ;
9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

d. Bendahara Penerimaan :

1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;

2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
3. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
6. harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;
8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD; dan
9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-1-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 10 /B.IX/HK/2013

TANGGAL: 2-1-2013

DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Drs. TAUHIDI, M.M. NIP. 19600405 198203 1 015 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	---	ABDULLAH NIP. 19681210 198903 1 003 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	URSIDA RAHMAN NIP. 19760101 200801 1 023 Pengatur Muda/IIa Staf UPTD BPKB Provinsi Lampung
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Hj. REIHANA, M.Kes. NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung		SUWANTO NIP. 19620319 198105 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	IRMA CARLINI, S.E., M.M. NIP. 19860813 200902 2 003 Penata Muda/IIIa Staf Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	drg. TORRY DUET IRIANTO, M.M., M.Kes. NIP. 19571212 198903 1 006 Pembina Utama Muda/IVc Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	---	SUTAN SYARIF NIP. 19571007 199003 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub. Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	OKTIN HERDINA NIP. 19611010 198703 2 009 Penata/IIIc Staf Sub. Bagian Mobilisasi Dana RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
4.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	dr. HERY DJOKO SUBANDRIYO, M.KM. NIP. 19610426 199603 1 001 Pembina / IVa Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	---	NANI ASTUTI NIP. 19680707 198903 2 008 Penata Muda/IIIa Staf Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	SULISIA, S.Sos. NIP. 19670909 199103 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
5.	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Ir. ARIF HIDAYAT, M.M. NIP. 19560528 199103 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Pj. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	---	FAIZ, S.E. NIP. 19660609 199203 1 009 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	NINUK SUDJIASIH, S.Sos. NIP. 19590922 198211 2 001 Penata Tk.I/IIId Staf Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
6.	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	---	NURBUANA, S.T., M.M. NIP. 19620826 199603 1 001 Pembina/IVa Kepala UPTD BIP Pemukiman dan Bangunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	MARHASAN NIP. 19690605 199803 1 012 Pengatur Tk. I/IId Staf Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	---
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ir. EDY YANTO, M.Si. NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	---	YAYAK PRAWOTO, S.Sos. NIP.19651010 199003 1 010 Penata Muda/IIIa Staf Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	---
8.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	ALBAR HASAN TANJUNG NIP. 19601108 200809 1 001 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	---	IRMA CAHYANI, A.Md. NIP.19750207 199803 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Subbag Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	DWI PURWANI NIP.19690306 198907 2 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Subbag Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	dr. RELIYANI R, M.Kes. NIP. 19570418 198311 2 002 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	---	MERITA NINGSIH, S.E. NIP. 19750526 200903 2 005 Penata Muda/IIIa Staf Sub.Bagian Keuangan BPLHD Provinsi Lampung	---
10.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. A. NURDIN SIFRIZAL, M.H. NIP. 19591130 199008 1 008 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	---	ZULAINIDIN, S.E. NIP. 19610701 198503 1 006 Penata Tk.I /IIId Staf Dinas Sosial Provinsi Lampung	---
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Ir. E PITERDONO HZ, M.M. NIP. 19601122 198903 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	---	MC.KALSUM, S.E. NIP. 19611221 198102 2 001 Penata Tk.I /IIId Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	SRI SUPRIYANTI, S.E. NIP.19731010 199903 2 005 Penata Muda/IIIa Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Hi. ARDHY WIJAYA, S.H., M.H. NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	---	SUKATMI, S.E. NIP.19650610 198903 2 010 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung	WAHYUNI SAMPARA, S.E., M.M. NIP.19760806 200212 2 004 Penata/IIIc Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung
13.	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	RUSLAN, S.H., M.H. NIP. 19560315 198302 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	---	DEFTUMAN NIP. 19631213 198912 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	---
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Drs. GATOT HUDI UTOMO NIP. 19581014 198503 1 012 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	---	SUSILOWATI NIP. 19721202 199203 2 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	ADELEIDA USMAN NIP. 19640209 199203 2 003 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	---	ANTRI ASTUTI NATALINA, S.H., M.M. NIP. 19641226 198903 2 005 Pembina Tingkat I/ IVb Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	MELIANA SARI NIP. 19680517 199103 1 003 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	M. DESNU WARDHANA, S.T. NIP. 19841218 200902 1 003 Pengatur Muda/IIa Staf UPT Pengelola Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Provinsi Lampung
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	HIDAYAT, S.H. NIP.19540306 198003 1 004 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	---	UMI MUSYAFATUR RIFATIN NIP. 19770612 200701 2 028 Pengatur Muda Tk.I/IIb Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	---
17.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	---	Drs. PARIJAN, M.M. NIP. 19591122 198811 1 001 Pembina Tingkat I/IVb Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	ANITA CAHYA, S.H. NIP. 19720330 199803 2 004 Penata /IIIc Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
18.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Hi. SUDARNO EDI, S.H., M.H. NIP. 19560911 197906 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	---	ANTHONI, S.E., M.M. NIP. 19770321 199703 1 002 Penata /IIIc Staf Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	---
19.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. BERLIAN TH, M.M. NIP. 19601119 198803 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Drs. LUKMAN, M.M. NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERU ELTANO K, S.STP. NIP. 19840625 200212 1 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ROSITA NIP. 19611222 198403 2 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Prov. Lampung
20.	Inspektorat Provinsi Lampung	HARUN AL-RASYID, S.H. NIP. 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya /IVd Inspektur Provinsi Lampung	---	SURESMI, S.E. NIP. 19650827 199203 2 004 Penata Tk.I/IIId Staf Sub Bagian Keuangan Inspektorat Prov. Lampung	---
21.	Sekretariat Badan Perwakilan Pemprov.Lampung di Jakarta	THERESIA SORMIN, S.H. NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda/ IVc Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta	---	SUPRIYANTO NIP. 19740115 199503 1 001 Penata Muda/IIIa Staf Sekretariat Badan Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta	ROSHI ANGGRAENI NIP. 19840817 200701 2 001 Pengatur Tk.I/IIb Staf Sekretariat Badan Perwakilan Pemprov. Lampung di Jakarta
22.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Hi. KHERLANI, S.E., M.M. NIP. 19620504 198103 1 004 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	---	YANTI HAKIM, S.H., M.M. NIP.19680102 198903 2 004 Penata/IIIc Staf Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	SRI RAHAYU ENDANG LESTARI NIP. 19650830 198603 2 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
23.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD ISA, S.H. NIP. 19570825 197902 1 001 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	---	SURYANI NIP. 19680205 199203 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
24.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Dra. ERSI HARTATI LENNY, M.M. NIP. 19570409 200704 2 001 Pembina Utama Muda /IVc Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	---	NURJASA NIP. 19760315 200701 1 018 Pengatur Muda Tk. I/IIb Staf pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	---
25.	Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	---	LISWARDY, SH NIP. 19640712 198503 1 014 Penata Tingkat I / III.d Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Prov. Lampung	ELDA, S.Sos. NIP. 19641212 198403 2 002 Penata/IIIc Staf Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	---
26.	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Drs. BUDIHARTO HN NIP. 19590220 198503 1 004 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	---	GUSTINA FITRI ARIYANTI, S.E. NIP. 19820814 201001 2 018 Penata Muda/IIIa Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	---
27.	Sekretariat Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. NASRIZAL JALINUS, M.M. NIP. 19590815 198603 1 007 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Sekretariat Badan Koord.Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan Provinsi Lampung	---	SARINGATUN NIP. 19600409 198503 1 014 Penata Muda Tk.I/IIb Staf Sekretariat Badan Koord.Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan Provinsi Lampung	---
28.	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Drs. SYARIP ANWAR, M.P. NIP. 19590303 198403 1 006 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Pendidikan Dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	---	SUPRAPTI,S.Sos. NIP. 19690318 199402 2 001 Penata Muda/IIIc Staf Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	---
29.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Drs. SOBRI, M.M. NIP. 19580223 198203 1 006 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	---	ARI WIJAYA, S.STP. NIP. 1870115 200602 1 001 Penata Muda/IIIa Staf Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
30.	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Hi. BIHIKMI SOEFIAN, M.M. NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	---	SRI MULYATI NIP. 19601008 198502 2 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	---
31.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	SUGIARTO, S.H. NIP.19541219 197803 1 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	---	DIANA RAHMAWATI, S.E. NIP. 19770822 200804 2 002 Penata Muda/IIIa Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	---
32.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Hi. TARMIZI NAWAWI, S.H., M.H. NIP. 19571212 198203 1 016 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	---	SUTIYAH NIP.19710416 199203 2 006 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	---
33.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	---	SUDIN, S.H., M.H. NIP. 19601111 198603 1 014 Pembina Tingkat I/IVb Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	GUSHANI NIP. 19630810 198703 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	---
34.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. LANA REKYANTI NIP. 19590107 198303 2 009 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	---	ABDUL HAMID, S.E. NIP. 19670408 199303 1 012 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	YETY,SP NIP. 19701211 199303 2 004 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
35.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Ir. SUTONO, M.M. NIP. 19580728 198602 1 002 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	---	KUSMAYATI, S.Sos. NIP. 19641117 198603 2 002 Penata/IIIc Staf Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	IDRUS NIP. 19650209 198908 1 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
36.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Ir. SETIATO, M.Sc. NIP. 19570617 198603 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	---	ABDUL RACHMAN NIP.19610102 198903 1 004 Penata/IIIc Staf UPTD BIBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SUMARNI NIP. 19640419 199001 2 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub. Bagian Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. WARSITO NIP. 19541107 198203 1 011 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	---	ROSLINA NIP. 19630716 198410 2 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	YENI HERAWATI, S.E. NIP. 19770131 199703 2 002 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
38.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ir. PRIHATONO G. ZAIN NIP. 19630411 198802 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Pj. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	---	ANDIRIAN JAYANEGARA NIP.19580116 198908 1 001 Penata Muda Tk. I/IIIb Staf Subbag Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	---
39.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	ZAINI NURMAN, S.H., M.H. NIP. 19570524 197911 1 002 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	---	SUTARNA, S.E. NIP. 19620530 199103 1 003 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	SOFIANA HAMDAN NIP. 19570515 198103 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.